

■ 5 Parpol Belum Serahkan LPj

Dana Bantuan Parpol Tak Bisa Dicairkan

KENDAL - Dana bantuan partai politik (parpol) untuk periode 2009-2014 belum bisa dicairkan karena lima dari sembilan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kendal belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Lima parpol yang belum menyerahkan LPj yaitu PKB, PPP, Hanura, Demokrat, dan Golkar.

"Lima parpol tersebut belum menyerahkan LPj tahun lalu sehingga kita belum bisa mencairkan bantuan untuk tahun ini," ujar Kepala Kesbangpol Ferinando Rad Bonay, Jumat (23/5).

Feri mengimbau kepada kelima parpol untuk segera menyerahkan LPj anggaran 2013 sekaligus proposal pencairan dana bantuan parpol tahun 2014. "Untuk PDIP, PAN, PKS, dan

Gerindra sudah menyerahkan LPj ke Kesbangpol dan sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa," kata Feri.

Menurut Feri, seharusnya LPj bantuan parpol diserahkan paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan namun hingga sekarang ada lima parpol yang belum menyerahkan. "Saat LPj kita minta mereka mengaku fo-

kus pada pileg. Sekarang kita dorong agar LPj segera diserahkan sekaligus menyiapkan proposal pencairan untuk tahun 2014," jelas Feri.

■ 2 Kali Pencairan

Feri menjelaskan, terkait mekanisme pencairan dana bantuan parpol ada dua kali pencairan, yakni periode Januari-Juli dan Agustus-Desember. "Bantuan pertama kami berikan selama tujuh bulan untuk parpol pemenang pileg periode 2009-2014, lalu yang kedua kami cairkan bantuan untuk parpol yang mendapatkan kursi parlemen periode 2014-2019. Namun untuk pencairan kedua dilakukan pada Agustus atau setelah pelantikan," imbuhnya.

Feri menjelaskan, besarnya dana bantuan parpol juga berbeda dalam setiap periode. Menu-

rut Feri, pada periode baru nanti setiap parpol akan menerima sekitar Rp 1,68 miliar per tahun sedangkan bantuan untuk periode sebelumnya jumlahnya hanya Rp 800 juta per tahun.

"Bantuan dana parpol diperoleh dari jumlah bantuan parpol dibagi jumlah suara sah pileg sehingga menghasilkan jumlah bantuan per suaranya. Untuk pileg periode ini satu suara dihargai Rp 1.854 sedangkan pada Pileg 2009 satu suara dihargai Rp 1.830," jelas Feri.

Dia menambahkan, dana bantuan tersebut merupakan anggaran untuk parpol-parpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi para kader serta untuk operasional sekretariat partai. "Sebanyak 60 persen diharapkan bisa membantu parpol untuk kegiatan pendidikan politik

seperti menjelaskan Empat Pilar Kebangsaan, sementara yang 40 persen merupakan dana untuk operasional partai," pungkas Feri. ■

Mar/SR

